

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, pembuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab – musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah, terutama konteks pemerintah daerah analisis perlu dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah agar kegiatan (program) tersebut tetap bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan

masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus mencakup keseluruhan kegiatan, mulai dari perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Dalam menghadapi krisis ekonomi sekarang ini, sebuah perusahaan ataupun lembaga usaha baik milik pemerintah maupun swasta dituntut untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dalam berbagai hal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian di negeri ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masing – masing daerah agar dapat menggali, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin. Ini berarti daerah diberikan kekuasaan sepenuhnya untuk mengembangkan wilayahnya, dimana pemerintah pusat hanya memiliki sedikit andil untuk memberikan bantuan pada pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus berupaya dalam memperbaiki kinerja keuangannya.

Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan dengan mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam setiap periode akuntansi dapat memberikan gambaran mengenai sehat tidaknya perusahaan tersebut. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan

apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk dapat merancang dan menetapkan anggaran sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar, Pemerintah Daerah memerlukan suatu alat perencanaan yang dapat menampung segala aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian pemerintah daerah harus membuat dan menetapkan suatu bentuk perencanaan keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri NO.13 Tahun 2006). Laporan APBD ini terdiri dari rincian pos pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Oleh karena itu, APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan di suatu daerah.

Sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, perhitungan anggaran daerah (perhitungan APBD) ini juga merupakan salah satu alat analisis laporan keuangan pemerintah. Analisis atas laporan keuangan ini akan memberikan informasi mengenai laporan surplus atau deficit antara pendapatan dan belanja yang mencerminkan hasil – hasil yang dicapai dalam periode tertentu (meliputi satu tahun). Dari perhitungan tersebut akan terlihat apakah penerimaan

yang telah dianggarkan pada tahap perencanaan dalam tetap diperoleh melalui pengeluaran dana (belanja) yang disebut belanja modal.

Belanja merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan investasi. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menguraikan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Adapun belanja yang dilakukan menyangkut pelayanan public yaitu belanja administrasi, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal (penambahan asset). Semua belanja tersebut merupakan pengeluaran untuk tujuan yang sama yaitu pemberian pelayanan public. Dari sebab itu maka perlu dilakukan analisis belanja modal (investasi) yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai sasaran dan belanja modal tersebut.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Permendagri Nomor 14 tahun 2006). Belanja modal dikategorikan dalam lima kategori yaitu : belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigrasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya. Belanja modal tersebut merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang juga mengelola keuangannya secara otonom. Pemerintah provinsi juga membuat suatu perencanaan keuangan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban

pengelolaan anggaran dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan realisasi anggaran. Berikut Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan aktivitas Belanja Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi NTT selama 4 (empat) tahun periode anggaran.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2014 – 2017

TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PROSENTASI(%)
2014	2.899.283.875.928	2.688.932.744.282	92,74%
2015	3.523.978.561.028	3.328.496.113.665	94,45%
2016	3.816.240.501.789	3.702.912.449.649	97,63%
2017	5.008.145.707.768	4.634.876.188.617,75	92,55%

Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2014 – 2017

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan, realisasi belanja daerah masih belum mencapai anggaran yang ditetapkan. Dilihat jelas pada prosentase Belanja Daerah yang mengalami naik – turun dari tahun 2014 – 2017. Hal ini diduga karena adanya perencanaan anggaran yang kurang matang.

Berikut tabel Belanja Modal pada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014 – 2017.

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2014 – 2017

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2014	475.695.783.957	407.600.788.970	85,69%
2015	696.852.477.347	606.702.214.577	87,69%
2016	633.202.476.402	602.299.044.635	95,12%
2017	605.402.548.924	482.924.904.340	79,77%

Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Tahun Anggaran 2014 – 2017

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat dari prosentse Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 – 2016 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 15,35%, dari 95,12% tahun 2016 menjadi 79,77%.

Jika dilihat hasilnya, tahun 2014 – 2017 mencukupi prosentasi proporsi belanja modal. Tetapi jika dilihat dari perbandingan prosentasi tahun 2014 – 2017 terlihat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sebesar 14,05% naik sebanyak 3,16% sebesar 17,21% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 turun sebanyak 1,43% sebesar 15,78%. Kemudian tahun 2017 mengalami penurunan lagi sebanyak 6,14% sebesar 9,64%. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar prosentase belanja modal terus ditingkatkan. Sayangnya masih banyak pemerintah daerah yang merasa kesulitan untuk mencapai target tersebut. Penggunaan Belanja Modal yang dituntut harus mengalami peningkatan oleh Pemerintah Pusat berdampak pada kinerja keuangan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 – 2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah mengoptimalkan alokasi dana belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya fluktuasi pada Belanja Modal tahun anggaran 2014 – 2017?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah mengoptimalkan alokasi dana belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya fluktuasi pada Belanja Modal tahun anggaran 2014 – 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang relevan serta bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam pengelolaan keuangandaerahnya dan dalam pengambilan keputusan

yang berkaitan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran terkait kinerja keuangan daerahnya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan objek penelitian yang serupa.
3. Bagi penulis sendiri, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yang lebih komprehensif mengenai semua aspek pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan objek dari penelitian ini.